



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 49 TAHUN 2016  
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA  
TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TABALONG.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong.
9. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong.
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong.
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan

- Kabupaten Tabalong.
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong.
  13. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong.
  14. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong.
  15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Perindustrian dan Perdagangan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) *Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri atas:*
  - a. *Sekretariat, terdiri atas:*
    1. Subbagian Perencanaan;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. *Bidang Industri, terdiri atas:*
    1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri;
    2. Seksi Perizinan dan Pendaftaran Usaha Industri; dan
    3. Seksi Informasi Perindustrian;
  - c. *Bidang Fasilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan, terdiri atas:*
    1. Seksi Pembinaan Pelaku Usaha dan Pengembangan Perdagangan;
    2. Seksi Sarana Distribusi dan Stabilisasi Barang Pokok dan

- Penting; dan
3. Seksi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Dagang;
- d. Bidang Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan, terdiri atas:
    1. Seksi Kemetrolagian; dan
    2. Seksi Pengawasan Perdagangan;
  - e. Bidang Pengelolaan Pasar, terdiri atas:
    1. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar; dan
    2. Seksi Pendapatan Pasar;
  - f. Unit Pelaksana Teknis;
  - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - a. koordinasi kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  - b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi, organisasi dan tata laksana Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  - d. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan layanan pengadaan barang/jasa pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Bidang Industri

Pasal 5

- (1) Bidang Industri dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Industri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Industri.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang

Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Industri.
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Industri.
- c. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Industri.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Fasilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan

##### Pasal 6

- (1) Bidang Fasilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Fasilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Fasilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Fasilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Fasilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan.
  - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Fasilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan.
  - c. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Fasilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan.

### Bagian Keempat

#### Bidang Kemetrollogian dan Pengawasan Perdagangan

##### Pasal 7

- (1) Bidang Kemetrollogian dan Pengawasan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Kemetrollogian dan Pengawasan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kemetrollogian dan Pengawasan Perdagangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Kemetrollogian dan Pengawasan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kemetrollogian dan Pengawasan Perdagangan.
  - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Kemetrollogian dan Pengawasan Perdagangan.
  - c. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Kemetrollogian dan Pengawasan Perdagangan.

Bagian Kelima  
Bidang Pengelolaan Pasar

Pasal 8

- (1) Bidang Pengelolaan Pasar dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Pasar.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengelolaan Pasar menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Pasar.
  - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Pasar.
  - c. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Pasar.

BAB V  
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI  
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VII  
TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan Dinas maupun antar satuan organisasi di luar lingkungan Dinas.

Pasal 12

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme

akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

#### Pasal 13

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

#### Pasal 14

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, mengawasi, memberikan pembinaan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB VIII

#### JABATAN DAN ESELON

#### Pasal 16

- (1) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

### BAB IX

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pejabat yang ada sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukannya penggantian dengan pejabat yang baru berdasarkan peraturan Bupati ini.

### BAB X

#### KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

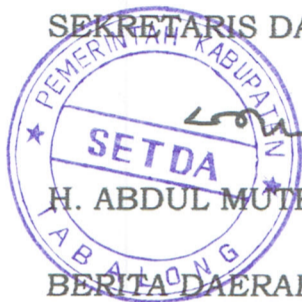
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 05 Desember 2016  
BUPATI TABALONG,



Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 05 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,



H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016 NOMOR 49